

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN SKALA KECIL DESA MADELLO KECAMATAN
BALUSU KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

**AYU AZHARI
L041 20 1045**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN SKALA KECIL DESA MADELLO KECAMATAN
BALUSU KABUPATEN BARRU**

**AYU AZHARI
L041 20 1045**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN SKALA
KECIL DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

Disusun dan diajukan oleh:

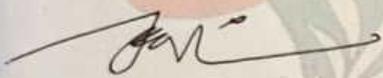
AYU AZHARI

L041201045

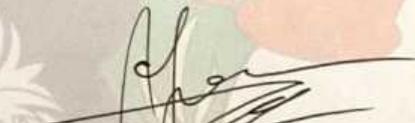
Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dinyatakan telah memenuhi syarat.

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota



Andi Amri, S.Pi., M.Sc., Ph.D
NIP. 197003071997031003



Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si.
NIP. 197104222005011001

Mengetahui

Ketua Program Studi
Agrobisnis Perikanan



Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi., M.Si
NIP. 19720926 200604 2 001

Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2024





PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Azhari
NIM : L041 20 1045
Program Studi : Agrobisnis Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Skala Kecil Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2007).



L041 20 1045.





PERNYATAAN AUTORSHIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Azhari

NIM : L041 20 1036

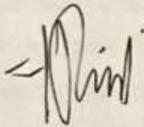
Program Studi : Agrobisnis Perikanan

Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi/Tesis/Disertasi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar,.....26 Juni.....2024

Mengetahui,



Dr. Sitti Fakhriyyah, S. Pi., M. Si
NIP. 197209262006042001

Penulis



Ayu Azhari
L041 20 1045



ABSTRAK

Ayu Azhari, L041 20 1045. “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Skala Kecil Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”. Dibimbing oleh **Andi Amri** Sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Adri** Sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil dalam aspek regulator, dinamisator dan fasilitator di Desa Madello . Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan skala kecil di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024 pada masyarakat nelayan di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Dinas Perikanan Kab. Barru serta Badan Penyuluh Kab. Barru . Metode penentuan lokasi yaitu secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan yaitu wilayah tersebut mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dalam bidang perikanan (nelayan) sehingga Desa Madello memerlukan peran pemerintah dalam memberdayakan nelayannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode penentuan sampel *purposive sampling* . Teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan nelayan berperan menyosialisasikan aturan-aturan sesuai dengan acuan KKP. Pemerintah sebagai dinamisator berperan dalam melaksanakan BIMTEK serta pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan sebagai upaya menggerakkan partisipasi masyarakat nelayan. Pemerintah sebagai fasilitator berperan memfasilitasi tenaga penyuluh dengan pemberian informasi dan pendampingan. Selain itu, Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa alat tangkap untuk nelayan dengan tujuan meningkatkan kapasitasnya. Adapun kendala pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan yaitu pemberian anggaran yang belum optimal, kurangnya partisipasi nelayan dalam kegiatan penyuluhan serta tidak meratanya pemberian bantuan saran dan prasarana yang diberikan nelayan.

Kata Kunci : Dinas Perikanan, peran pemerintah, pemberdayaan, nelayan, kendala



ABSTRACT

Ayu Azhari, L041 20 1045. "The Government's Role in Empowering Small-Scale Fishermen in Madello Village, Balusu District, Barru Regency". Supervised by **Andi Amri** as Main Advisor and **Andi Adri** as Member Advisor

This research aims to determine the role of the government in empowering small-scale fishermen in the aspects of regulator, dynamist and facilitator in Madello Village. Apart from that, this research also aims to determine the government's obstacles in empowering small-scale fishermen in Madello Village, Balusu District, Barru Regency. The research was carried out in February – March 2024 in fishing communities in Madello Village, Balusu District, Barru Regency and the District Fisheries Service. Barru and the District Extension Agency. Barru . The method for determining the location is purposive with the consideration that in this area the majority of the population depends on fishing (fishing) so that Madello Village needs the government's role in empowering its fishermen. The type of research used is a qualitative and quantitative approach with a purposive sampling method. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. The results of this research show that the Government as a regulator in empowering fishermen plays a role in disseminating regulations in accordance with the KKP reference. The government as a dynamist plays a role in implementing BIMTEK as well as the formation and development of fishing groups as an effort to encourage fishing community participation. The government as a facilitator plays a role in facilitating extension workers by providing information and assistance. Apart from that, the Fisheries Service also provides assistance in the form of fishing gear to fishermen with the aim of increasing their capacity. The government's obstacles in empowering fishermen are the provision of a budget that is not yet optimal, the lack of participation of fishermen in extension activities and the uneven provision of advice and infrastructure provided by fishermen.

Keywords: Fisheries Service, government role, empowerment, fishermen, obstacles



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang merupakan pemilik segala kesempurnaan, memiliki pengetahuan dan kekuatan yang tak terbatas. Penulis bersyukur atas pemberian-Nya berupa kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia yang telah melimpah selama proses penyelesaian skripsi ini. Doa dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, membawa manfaat hingga kita dapat merasakan nikmatnya hidup dalam zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Desa Madello Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ibu **Hj. Munira** & ayah **Muh. Arsyad** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang serta tak pernah berhenti memberi semangat dan memanjatkan doa terbaik untuk penulis.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis hantarkan kepada Bapak Andi Amri, S.Pi., M.Sc, Ph.D. selaku penasehat akademik, pembimbing ketua dan juga telah menjadi orang tua dalam memberikan nasihat, arahan, dukungan, dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pula kepada Bapak Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. **Bapak Prof. Safruddin, S. Pi., MP., Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Prof. Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP.** selaku Wakil Dekan Bidang I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Fahrul, S. Pi., M. Si.** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Ibu Dr. Sitti Fakhriyah, S. Pi., M. Si.** selaku Ketua Proogram Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Dr. Andi Amri, S.Pi., M.Sc** dan **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menulis skripsi.
6. **Prof. Dr. Ir. Mardiana Ethrawaty Fachry, M.S & Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Pi., M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru serta masukan saran dan kritik yang sangat membangun.
7. **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin
8. **Seluruh Staf Administrasi** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.

Ucapan terimakasih dan limpahan rasa bangga melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini

1. Kakak saya, **Darmawan** dan Adek saya, **Muh. Akbar dan Muh. Akmal.** Terimakasih sudah memberikan perhatian serta sponsor selama penulis melaksanakan kuliah.
2. **Teman KKN Gel. 110 Desa Labbo** dan **masyarakat Desa Labbo** yang juga turut membersamai selama ini.
3. **Teman-teman E20ULIS** (Agrobisnis Perikanan Angkatan 2020) yang selalu ada disaat susah dan selalu menjadi tempat berkumpul yang nyaman.
4. Terkhusus **Muh. Fadly Syam** yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Sobat-sobat Wis-udah **Mila Amelia Putri, Adellah Masnur, Nur Alimatul Izzah, Nursakina, Ina Maisara,** dan **Rasyika Bintin Darwis** yang selalu menjadi partner suka dan duka dalam berbagai hal.

Itupun penulis **Ridha Riskiana** dan **Nurwahida** yang juga menjadi tempat saling bercerita, saling support, dan saling berbagi kesenangan satu sama lain.

Teman Antang **Lisnawati, Kiki Wahyuni,** dan **Hastika Pratiwi** yang berikan bantuan dan dukungan.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis meminta maaf apabila ada yang tidak berkenan dan senantiasa berharap untuk menerima kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 juni 2024


Penulis



ai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Lawampang, Kabupaten Barru, pada tanggal 24 September 2002, sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Arsyad dan Ibu Hj. Munira . Pendidikan dimulai dari SDN 192 Barru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan ke SMPN 34 Barru pada tahun 2014 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Pendidikan seterusnya dilanjutkan ke SMAN 2 Barru pada tahun 2017, dan penulis meraih kelulusan pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin, mengambil Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan melalui jalur SNPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis terlibat dalam organisasi fakultas seperti Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEI), sebagai anggota penuh dalam himpunan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 110 tahun 2023 di Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan melaksanakan Praktik Kerja Profesi (PKP) pada PT. Perikanan Indonesia Cabang Kota Makassar pada tahun 2023. Sebagai tugas akhir, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Skala Kecil Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN AUTORSHIP	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
BIODATA PENULIS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Definisi Peran.....	4
B. Pemerintah.....	5
C. Nelayan	8
D. Nelayan Skala Kecil	9
E. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kerangka Pikir.....	14
III. METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	15
B. Jenis Penelitian	15
C. Populasi dan Sampel.....	15
D. Sumber Data	16
E. Teknik Pengambilan Data	16
F. Teknik Analisis Data	17
G. Langkah-langkah Penelitian	21
H. Tahap Operasional	21
I. Lokasi Penelitian.....	22
J. Karakteristik Informan	25
K. Metode Pengumpulan Data	22
L. Teknik Analisis Data	25



C.	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Perikanan Kab.Barru	27
D.	Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	29
E.	Kendala Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	38
V.	PEMBAHASAN	40
A.	Pemerintah Sebagai Regulator.....	40
B.	Pemerintah Sebagai Dinamisator	40
C.	Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	43
D.	Kendala Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	45
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	47
A.	Kesimpulan.....	47
B.	Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah informan penelitian	16
Tabel 2. Penentuan Tingkat Peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan skala Kecil	18
Tabel 3. Indikator peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil	19
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	24
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa Madello	25
Tabel 7. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Umur di Desa Madello	26
Tabel 8. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Madello ..	27
Tabel 9. Matriks peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan nelayan di Desa Madello	30
Tabel 10. Tingkat Peran Pemerintah Sebagai regulator dalam pemberdayaan nelayan skala kecil di desa Madello	31
Tabel 11. Matriks peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemberdayaan Nelayan skala kecil di Desa Madello	31
Tabel 12. Matriks kebutuhan masyarakat nelayan skala kecil dalam aspek dinamisor	33
Tabel 13. Tingkat Peran Pemerintah sebagai dinamisor dalam pemberdayaan nelayan skala kecil desa Madello	34
Tabel 14. Matriks peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan nelayan di Desa Madello	36
Tabel15. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan di Desa Madello	37
Tabel 16. Tingkat Peran Pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan nelayan skala kecil	38
Tabel 17. Tingkat Kendala Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan..	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	14
Gambar 2. Lokasi Penelitian	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Umum Responden.....	51
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	53
Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian	56



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km² yang tentunya memiliki potensi yang sangat besar baik potensi sumber daya hayati maupun non hayati. Hal ini berdampak pada masyarakat yang menempati wilayah daerah pesisir banyak yang menggantungkan atau mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kekayaan laut yang sangat melimpah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus turut andil dalam memanfaatkan dan mengelola dengan baik kekayaan laut (Hafid, 2019).

Pemerintah merupakan unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan.

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi dan sosial dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat nelayan sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, juga mengalami berbagai kendala dalam kegiatan usahanya. Permasalahan umum yang melingkupi kehidupan nelayan yaitu kualitas sumber daya manusia (nelayan) yang masih rendah, terbatasnya akses permodalan, pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan hasil tangkapan ikan sehingga dibutuhkan pemberdayaan masyarakat nelayan (Rawita et al., 2021)

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih spesifik ditingkat lokal untuk membentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati



dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan. Adapun tugas pemerintah daerah yaitu sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator (Ners *et al.*, 2021).

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Maka dari itu diperlukannya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang optimal dan merata. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah harus dapat menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

Barru merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah perairan yang cukup potensial sebagai pengembangan usaha penangkapan ikan. Barru dengan luas wilayah 1.175 km^2 , jumlah penduduk sekitar 171.906 jiwa dengan komposisi 80% petani dan 7.5% nelayan dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,03%. Produksi perikanan tangkap di kecamatan balusu khususnya desa madello pada tahun 2021 menurun sebesar 3782,68 ton. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan mendalam nelayan serta alat tangkap yang kurang memadai. Potensi perikanan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir Kabupaten Barru khususnya Desa Madello yang menjadikan usaha penangkapan ikan sebagai salah satu sumber penghasilan. Akan tetapi pendapatan nelayan kian hari kian menurun dan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap nelayan di desa madello ini. Satu hal yang menjadi penyebab utama bagi munculnya kemiskinan yang dihadapi nelayan desa madello adalah keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan teknologi yang terbatas, maka ketergantungan terhadap musim menjadi sangat tinggi, dan wilayah tangkapnya juga terbatas, akibatnya hasil tangkapan juga terbatas (Hafid & Abu, 2019).

Pendapatan masyarakat nelayan masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Pendapatan nelayan sangat ditentukan oleh tingkat tangkapan. Ketika tingkat tangkapan banyak, maka nelayan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya, Ketika tingkat tangkapan sedikit, atau mungkin tidak ada, maka pendapatan yang diterima nelayan sangatlah kecil. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ruswanty (2019), bahwa tingkat pendapatan nelayan akan

berubah sesuai dengan pola kehidupan nelayan, rendahnya tingkat produktivitas mempengaruhi penerimaan nelayan sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima. Faktanya hari ini masih menunjukkan bahwa tingkat tangkapan oleh nelayan masih rendah. Sehingga pendapatan yang diterima pun sangat kecil. Ketika hal tersebut terjadi, maka jangan pernah berharap bahwa masyarakat nelayan bisa menjadi



masyarakat yang kelas kehidupannya bisa meningkat. Masyarakat nelayan akan terus menjadi masyarakat yang dimarjinalkan dan dipandang rendah. Jangan pernah berharap juga masyarakat nelayan bisa menjadi tonggak kemajuan ekonomi negara selama persoalan tersebut masih berlanjut (Ansori *et al.*, 2022).

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan merupakan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Madello yang masih mengalami kemiskinan dan kurang mendapatkan kepedulian oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Barru seharusnya memfungsikan perannya sebagai regulator, dinamisator serta fasilitator terhadap masyarakat nelayan. Atas dasar latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil dalam aspek regulator, dinamisator dan fasilitator di Desa Madello ?
2. Apa saja kendala pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil di Desa Madello ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil dalam aspek regulator, dinamisator dan fasilitator di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan studi dan menjadi salah satu pemikiran dalam meningkatkan peran pemerintah di Desa Madello, Balusu. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sehingga menghasilkan solusi kepada semua pihak yang terkait khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Barru.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Peran

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya) (Di *et al.*, 2021).

Menurut Nye, Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normative dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (Mokalu *et al.*, 2021).

Sedangkan menurut Poerwodarminta peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat setempat (Rumekti & Pinasti, 2016).

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan



Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah.

B. Pemerintah

Menurut Ali Faried (2012:2) Pemerintah atau Government dalam bahas inggris diartikan sebagai: "*The authoritative direction and administration of the affairs of man/woman in nation, state, city, etc*" yang berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota sebagainya. Menurut Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda (2012:28) Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Said, 2015).

Selanjutnya menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Seobiato adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas) (Totok, 2012).

Pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan oleh

isiasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal berikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Pemerintah an satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu



untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Ondang *et al.*, 2019).

Menurut Arif (2012) Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

a) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya (Inu, 2013).

b) Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Pemerintah sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat nelayan. Bimbingan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan nelayan. Pengarahan adalah suatu proses pembinaan, memberi petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan (direction) juga diartikan keinginan untuk membuat orang lain untuk mengikuti keinginan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

Pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam maupun diluar organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran. Sedangkan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (perorangan atau kelompok) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal guna untuk memahami lingkungan, mengatasi hambatan dalam menentukan rencana masa depan yang lebih baik (Sapriadi, 2018).

c) Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha untuk atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan/ permodalan.



Salah satu tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah penyuluhan. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama perikanan agar mereka dapat mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari tim penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan (Inu, 2013).

Peran utama tenaga penyuluh dan pendamping ini adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat/kelompok binaan dengan pihak-pihak luar. Selain itu, tenaga penyuluh dan pendamping juga berperan dalam mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat/ kelompok binaan yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan serta sebagai problem solution seputar perikanan serta sebagai mediator antara masyarakat/kelompok binaan dengan pihak-pihak luar termasuk dengan pemerintah daerah (Safrida *et al.*, 2015)

Pemerintah sebagai fasilitator juga harus dapat menciptakan kondisi yang mengarah pada implementasi pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas untuk kualitas hidup yang lebih memadai. Selain memberikan pendampingan pemerintah harus dapat memfasilitasi masyarakat dalam pendanaan dan permodalan ataupun pengembangan sarana prasarana. Sarana prasarana salah satu faktor pendukung produktifitas produksi masyarakat, Semakin banyak fasilitas yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memudahkan pekerjaanya akan meningkatkan ekektibilitas pemberdayan dan pendapatan masyarakat. Sehingga salah satu penilaian kesejahteraan masyaraaat dapat di lihat pula dalam konteks sarana prasarana yang dimiliki.

Menurut Hamdi (2002: 8) fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan. Pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum. Pelayanan terhadap hak-hak masyarakat berisi kegiatan untuk memudahkan masyarakat menikmati hidupnya yang patut atau pantas sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Sedangkan pelayanan teradap kewajiban berisi kegiatan untuk memampukan masyarakat memahami kepatuhan yang semestinya dikembangkan. Pelayanan ini kemudiaan sangat berkaitan dengan fungsi pemberdayaan (Nurdin et al., 2019)



C. Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan identik dengan keterbatasan asset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dana akses pasar. Sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Retnowati, 2020)

Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik social dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun didalam hubungan bermasyarakat (Ansori *et al.*, 2022)

Terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan; juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan (Abidin As, 2019).

Pollnack (1998), menyebutkan nelayan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu : nelayan skala besar (*large scale fisherman*) dan nelayan skala kecil (*small scale fisherman*). Ciri perikanan skala besar adalah : diorganisir dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana, baik skala kecil maupun awak perahu, menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang diekspor. Selanjutnya, nelayan skala besar dicirikan dengan besarnya teknologi penangkapan maupun jumlah armada. Mereka lebih berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah



kapal (ABK) dengan orientasi kerja yang kompleks. Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut juga semakin hierarkhis. Hal tersebut menjadikan nelayan besar sering disebut sebagai nelayan industri (*industrial fisher*).

Dilihat dari aspek teknologi, nelayan skala kecil dan nelayan tradisional pada umumnya cukup terampil dengan peralatan yang dimilikinya yang merupakan sarana tangkap dengan kemampuan terbatas tetapi sukar untuk ditingkatkan ke arah modernisasi. Sumberdaya manusia (pendidikan yang rendah) dan posisi ekonomi nelayan yang sangat rendah karena modal terbatas, produktifitas rendah dengan hasil tangkapan yang tidak menentu karena pengaruh musim, serta jaminan pemasaran yang tidak menentu pula karena berbagai kendala. Keadaan ini akan menyulitkan dalam proses transformasi teknologi yang akhirnya menghambat transformasi struktural masyarakat nelayan kearah kondisi yang lebih baik. Kondisi prasarana dan sarana seperti jalan, dermaga, pasar, TPI, dok serta *cold storage* dan pabrik es belum menunjang upaya peningkatan produksi dan mutu hasil tangkapan nelayan (Astuti & Desi, 2015).

D. Nelayan Skala Kecil

Data KKP.go.id menyebut, hampir 85% nelayan di Indonesia merupakan nelayan skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai. Memang, di negara maritim tercinta ini, secara populasi, nelayan kecil menjadi mayoritas, tapi tak berarti dalam hierarki prioritas mereka ada di atas. Menurut UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).” Sedangkan menurut UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia (Halim *et al.*, 2020)

Sementara ciri nelayan skala kecil; beroperasi di daerah pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya, pada umumnya bersifat padat karya, belum menggunakan alat tangkap maju (modern), berorientasi subsisten sehingga sering disebut sebagai *peasant-fisher*. Biasanya hasil tangkapan dijual kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan untuk diinvestasikan kembali untuk mendapatkan keuntungan (Adha *et al.*, 2022)



Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (No 7 Tahun 2016), Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT. Sementara Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local (Mansur *et al.*, 2019)

Tak hanya dua, versi lain definisi nelayan kecil juga hadir pada UU no 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Yang terbaru, UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru menghapus batasan kapasitas kapal dalam nelayan kecil (Pramoda, 2019).

Nelayan-nelayan kecil yang tersebar di sepanjang pesisir Indonesia ini menjadi salah satu kantong populasi miskin Indonesia. Hasil Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 menunjukkan bahwa nelayan merupakan salah satu profesi paling miskin di Indonesia. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran (5,56%), konstruksi bangunan (9,86%), serta pengelolaan sampah (9,62%).

Nelayan kecil merupakan salah satu kelompok pertama yang paling terdampak situasi buruk seperti perubahan iklim dan pandemi global seperti sekarang ini. Sumber daya mereka untuk melaut dan pemasaran hasil tangkapan mereka terbatas. Kapal-kapal kecil mereka tentu tak cukup kuat untuk menerjang ombak yang makin kesini makin tinggi akibat krisis iklim. Ditambah PPKM selama pandemi, ruang penjualan ikan pun semakin menyempit. Kapal kecil memperoleh ikan sedikit, setibanya di pesisir pun kerap kesulitan membayar mesin pendingin. Al hasil, ikan dibuang membusuk, dan nelayan kecil bukan untung melainkan rugi (Hutomo, 2021).

Secara operasional, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan telah membagi jalur penangkapan ikan menjadi 3 tiga (tiga), yakni jalur I untuk 0-4 mil garis pantai, jalur II 4-12 mil dari garis pantai, dan jalur III di atas 12 mil sampai Zona Ekonomi Eksklusif.

Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari PP 27 Tahun 2021 yang merupakan nomor II Tahun 2020 alias UU Cipta Kerja. Lewat aturan tersebut, kapal besar dan diatas 30 gross ton (GT) hanya boleh menangkap ikan di atas 12 mil dari . Khususnya kapal-kapal yang diatas 30 GT, tidak boleh turun ke bawah 12 (Hutomo, 2023).



Jalur I, hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil dengan ukuran kapal hingga 5 GT. Jalur II, untuk ukuran kapal 5-30 GT. Jalur III untuk kapal-kapal besar diatas 30 GT. Pengaturan ini dibuat untuk melindungi nelayan kecil dan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI. Meski demikian, kapal-kapal kecil tersebut dibolehkan beroperasi ke jalur II dan jalur III jika memenuhi syarat tertentu, seperti syarat keselamatan dan syarat lain yang ditentukan oleh kementerian (Arief, 2023)

E. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber- sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Alhamuddin, *et al.*, 2020)

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah sebuah konsep dan kerangka yang ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan dan mempromosikan keadilan serta keberlanjutan dalam perkembangan masyarakat. Dalam konsep dan kerangka pemberdayaan, kemiskinan dimaknakan secara structural, kemiskinan terjadi karena bekerjanya struktur yang memiskinkan, bukan sepenuhnya karena ketidakmampuan dari pihak miskin tersebut. Lebih tajam lagi, diasumsikan bahwa kemiskinan terjadi karena berlangsungnya pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) melalui ekspansi kapitalisme global miskin (Arief, 2002).

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan mereka seperti yang mereka inginkan. Pendekatan utama dalam konsep



pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (2004) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Mokalu *et al.*, 2021).

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah sebuah konsep dan kerangka yang ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan dan mempromosikan keadilan serta keberlanjutan dalam perkembangan masyarakat. Dalam konsep dan kerangka pemberdayaan, kemiskinan dimaknakan secara structural, kemiskinan terjadi karena bekerjanya struktur yang memiskinkan, bukan sepenuhnya karena ketidakmampuan dari pihak miskin tersebut. Lebih tajam lagi, diasumsikan bahwa kemiskinan terjadi karena berlangsungnya pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) melalui ekspansi kapitalisme global miskin (Arief, 2002).

Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan social yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan (Akil, 2013)

Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan (Satria, 2001). Kemandirian masyarakat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik (Abidin As, 2019).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan nantinya.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Ramdayanti, Gilli Argenti, dan Prilla Marsingga pada tahun 2021 dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis melalui Teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan berdasar kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2016. Peran pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Sonia dan Susilawati dengan judul *Literature Review* : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada tahun 2022. Metode Penelitian ini adalah *Literature Review* dengan menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan, mengumpulkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan dari Analisa Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat pesisir masih kurang optimal di karenakan masih ada masyarakat yang belum memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah, masyarakat kecewa karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka, dan kurangnya anggaran untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut (Sonia & Susilawati, 2022)

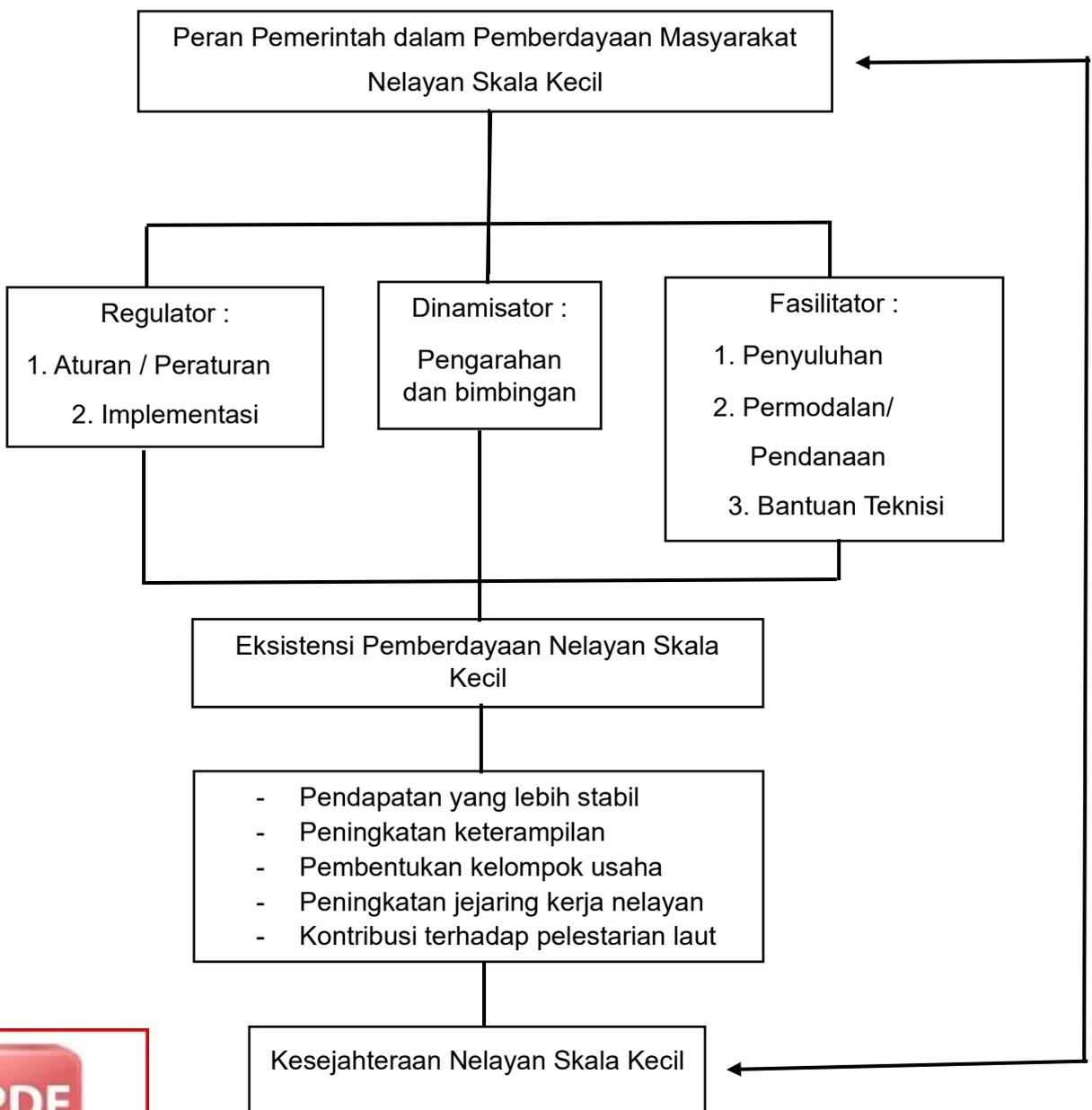
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Rahmalia dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode penentuan sampel purposive sampling. Teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teori Miles and Huberman. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kab. Maros sebagai regulator dalam pemberdayaan nelayan mengacu pada Undang-undang yang bersifat nasional yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dinas Perikanan juga berperan menyosialisasikan aturan-aturan sesuai dengan acuan Undang-Undang No.7 Tahun 2016. Dinas Perikanan Kab. Maros sebagai dinamisator berperan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, serta pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan. Pemerintah sebagai fasilitator berperan



memfasilitasi tenaga penyuluh dengan pemberian informasi dan pendampingan. Selain itu, Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa alat tangkap untuk nelayan dengan tujuan meningkatkan kapasitasnya

E. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir yang digunakan untuk mendukung dan memandu penelitian untuk mengeksplorasi alur skema pemikiran penulis untuk memberikan gambaran tentang struktur pemikiran berbasis penelitian yang membahas masalah penelitian utama, yaitu :



Gambar 1. Kerangka Pikir

